



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

MAJU MANDIRI MODERN

Volume XXXIX/Edisi MEI 2022

# Beritani



## Turun, Terkoordinasi, Terkendali



Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) optimistis penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat dikendalikan secara cepat. Karena itu, SYL mengajak agar semua pihak 'perang' atau turun langsung dan terlibat aktif dalam menekan jumlah penularan.

[www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)

**PENGARAH:**  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian

**PENANGGUNG JAWAB:**  
Kepala Biro Humas  
dan Informasi Publik

**PENYUNTING:**  
Drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si

**REDAKSI PELAKSANA:**  
Abiyadun, SE, MM

**ANGGOTA REDAKSI:**  
Dra. Ria Satiti  
Imam Santoso, SE  
Alice Raga Dewi, S.Sos  
Hendrayani Yacob, S.Sos  
Makmur, SE  
Tuyono



Isi diluar tanggungjawab percetakan  
Dilarang mengutip tanpa izin  
**Majalah Beritani**

Salam Redaksi

## Dapat Disembuhkan dan Dikendalikan

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran selama ini, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masuk dalam kategori penyakit hewan yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Sebab, seluruh bagian daging pada hewan yang positif PMK dapat dimakan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Ada tiga strategi yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengatasi PMK pada hewan ternak. Pertama, mengajak menerapkan strategi intelektual sebagai langkah percepatan. Kedua, menerapkan strategi manajemen sebagai langkah penguatan. Terakhir, strategi perilaku sebagai langkah bersama dalam menghilangkan PMK.

Pemerintah daerah (pemda) juga diminta untuk mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang ada di tiap kecamatan. Keberadaan puskesmas sangat vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penularan kontak langsung anatar hewan ke hewan atau manusia ke hewan. Selain itu, keberadaan puskesmas selama ini mampu mendekatkan peternak dengan petugas kesehatan hewan.

Sementara Pusvetma yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementan saat ini sedang proses pembuatan vaksin untuk PMK. Seiring dengan kejadian wabah masuknya PMK, proses pengembangan produksi vaksin di Pusvetma dimulai kembali dan saat ini telah memasuki purifikasi isolate dan phase keenam.

Bagaimana stok ternak menjelang Hari Raya Iduladha? Kementan memastikan wabah PMK tidak memengaruhi stok ternak untuk perayaan Hari Raya Kurban pada tahun ini. Stok ternak ruminansia secara nasional sangat mencukupi.

Mengacu pada data nasional tahun lalu, populasi sapi potong mencapai 18 juta, kerbau 1,2 juta, kambing 19,2 juta, dan domba 17,9 juta ekor. Bila bercermin pada penyelenggaraan kurban pada 2021, total penyembelihan hewan kurban saat itu hanya sebanyak 1,7 juta ekor yang terdiri dari 609,5 ribu ekor sapi, 14,2 ribu ekor kerbau, 281,3 ribu ekor kambing, dan 750,6 ribu ekor domba.

Sekali lagi PMK dapat disembuhkan dan tidak berbahaya dikonsumsi manusia. Kementan bersama sejumlah daerah yang terkontaminasi PMK menyatakan siap menghadapi Iduladha. Meski ada PMK, pasokan sapi kurban yang ada tidak bermasalah. (\*)



## Daftar Isi

6

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau dikenal Foot and Mouth Disease adalah penyakit hewan menular yang menyerang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi.

17

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak memengaruhi stok ternak untuk perayaan Iduladha atau Hari Raya Kurban pada tahun ini. Stok ternak ruminansia secara nasional disebut sangat mencukupi.

22

Untuk memantau ke lapangan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) terjun langsung ke wilayah terjangkit penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

30

Menyikapi kejadian munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur (Jatim) seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan, serta Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kementerian Pertanian (Kementan) secara aktif telah melakukan upaya pencegahan terjadinya penyebaran dan tracing penyakit ini.

40

Ekspor sektor pertanian hingga saat ini masih ciamik atau bagus. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor pertanian pada April 2022 mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 15,89 persen (YonY) dibanding periode yang sama tahun lalu.

48

Jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) diminta untuk bekerja memperkuat pengawasan pembangunan pertanian nasional melalui sinergitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti BPK, Polri dan Kejaksaan.

# Turun, Terkoordinasi, Terkendali

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) optimistis penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat dikendalikan secara cepat. Karena itu, SYL mengajak agar semua pihak 'perang' atau turun langsung dan terlibat aktif dalam menekan jumlah penularan.

## TENTANG PMK

- Virus penyakit mulut dan kuku atau Foot-and-Mouth Disease Virus (FMDV)
- Penyakit PMK sangat menular
- PMK menyerang hewan berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, babi, juga hewan liar seperti gajah, rusa dll
- Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan hidup di tulang, kelenjar susu serta produk susu.
- Masa inkubasinya selama 1-14 hari
- Angka kesakitan hewan bisa mencapai 100%
- Angka kematian tinggi pada hewan muda atau anak.
- PMK disebabkan virus RNA masuk genus Aphovirus keluarga Picorna viridae

Sumber: Ditjen PKH Kementan



## PENANGANAN PMK

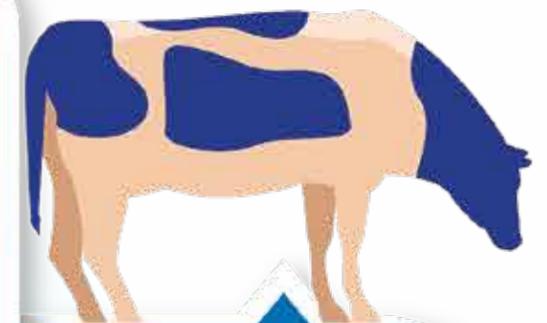
- Menyiapkan vaksin PMK
- Pendataan jumlah harian ternak terinfeksi PMK
- Penetapan lockdown di tingkat desa/kelurahan
- Pemusnahan ternak yang terkonfirmasi PMK secara terbatas
- Memberikan antibiotik, vitamin, dan penguat imun ternak
- Memperketat Bioscurity dengan cara memberikan semprotan cairan disinfektan
- Mendistribusikan obat-obatan, desinfektan, dan petugas kesehatan ke wilayah yang tercatat kasus. Pembatasan dan pengawasan ketat, baik melalui lalu lintas ternak, pasar, dan rumah potong hewan
- Mengedukasi peternak terkait pengendalian dan pencegahan PMK

Sumber: Ditjen PKH Kementan

## STRATEGI KEMANTAN ATASI PMK

- Menerapkan strategi intelektual sebagai langkah percepatan
- Menerapkan strategi manajemen sebagai langkah penguatan
- Menerapkan strategi perilaku sebagai langkah bersama menghilangkan PMK

Sumber: Kementan



## AGENDA KEMANTAN TANGGULANGI PMK

- Agenda Temporary
- Pengadaan vaksin
- Melakukan vaksinasi darurat
- Pembatasan lalu lintas hewan & produk hewan

## JEJAK PMK DI INDONESIA

- PMK pertama kali di Malang pada 1887 akibat impor sapi dari Belanda
- PMK menyebar ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi
- Beberapa kali mengakibatkan wabah PMK
- Program vaksinasi massal dimulai pada 1974
- Pada periode 1980-1982 tidak ada lagi kasus PMK
- Wabah PMK kembali terjadi di Blora, Jawa Tengah pada 1983
- Wabah ini dapat dikendalikan dengan vaksinasi
- Indonesia deklarasi bebas PMK pada 1985
- Status bebas ini diakui internasional OIE pada 1990
- Pada Mei 2022, wabah PMK dilaporkan di Jawa Timur dan Di Aceh

Sumber: Wikipedia

## TANDA KLINIS PMK

- Hewan Ternak demam tinggi, mulai 39-40 derajat Celsius
- Keluar lendir berlebihan dari mulut hewan dan berbusa
- Terdapat luka-luka hewan seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah
- Hewan tak mau makan, luka pada kaki dan diakhiri lepasnya kuku, kaki pincang
- Hewan sulit berdiri, gemetar, napas cepat, produksi susu turun drastis, hingga kurus

Sumber: Ditjen PKH Kementan

## AGENDA SOS

- Pemusnahan terbatas ternak positif PMK
- Pemberlakuan lockdown zona wabah PMK di kecamatan/kabupaten
- Sosialisasi dan edukasi masyarakat SOP Pencegahan dan pengendalian PMK

## AGENDA PERMANEN

- Pembuatan vaksin oleh Pusat Veteriner Farmasi (Pusvetma)
- Vaksinasi massal
- Surveilans secara rutin

Sumber: Kementan

“

Jadi sebenarnya PMK ini dapat disembuhkan dan tidak menular ke manusia, tetapi kita harus waspada dan terus bekerja. Yang terpenting tidak boleh membangun kepanikan karena itu sangat berbahaya,”

Syahrul Yasin Limpo  
Menteri Pertanian RI



Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau dikenal Foot and Mouth Disease adalah penyakit hewan menular yang menyerang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, PMK bisa disembuhkan melalui tiga strategi. Pertama, Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak untuk menerapkan strategi intelektual sebagai langkah percepatan. Kedua, menerapkan strategi manajemen sebagai langkah penguatan. Terakhir, strategi perilaku sebagai langkah bersama dalam menghilangkan PMK.

Mentan juga menjelaskan tiga agenda yang akan dilakukan Kementan dalam menanggulangi PMK yang berlaku secara nasional. Pertama adalah agenda temporary, yaitu dengan pengadaan vaksin, melakukan vaksinasi darurat, dan pembatasan lalu lintas hewan serta produk hewan.

“Kami juga menyiapkan agenda SOS, seperti melakukan pemusnahan terbatas ternak yang terkonfirmasi positif



PMK, pemberlakuan *lockdown* zona wabah pada tingkat kecamatan/Kabupaten di setiap wilayah, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait SOP (Standar Operasional Prosedur) Pencegahan dan pengendalian PMK," ujarnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (12/5/2022).

Agenda ketiga, lanjut Mentan, yaitu Agenda Permanen, melalui pembuatan vaksin oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), vaksinasi massal dan surveilans secara rutin.

"Jadi sebenarnya PMK ini dapat disembuhkan dan tidak menular ke manusia, tetapi kita harus waspada dan terus bekerja. Yang terpenting tidak boleh membangun kepanikan karena itu sangat berbahaya," ujar SYL.

Mentan mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran selama ini,

PMK masuk dalam kategori penyakit hewan yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Sebab, seluruh bagian daging pada hewan yang positif PMK dapat dimakan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

"Sekali lagi PMK dapat disembuhkan dan tidak berbahaya dikonsumsi manusia. Kedua, jajaran Kementan bersama 16 daerah yang terkontaminasi PMK menyatakan siap menghadapi Iduladha. Meski ada PMK, pasokan sapi kurban yang ada tidak bersoal," tandasnya, Rabu (18/5/2022).

Di sisi lain, Kementan juga telah membangun Posko Pengaduan dan Crisis Center PMK. Masyarakat yang memiliki hewan dengan gejala PMK dapat menghubungi nomor 081286345622. Posko darurat tanggap darurat ini dikelola langsung Direktorat Jenderal Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kementan.

"Karena itu, jajaran Kementan Siaga 1 dan lintas sektor di bawah jajaran dirjen terus bekerja. *Alhamdulillah* sekarang tren penyebarannya sudah menurun," pungkasnya.

SYL berharap PMK yang mewabah ini berada pada level yang ringan dengan tingkat resiko rendah, sehingga jenis PMK ini dapat ditangani secara cepat. "Kita harus berhadapan dengan PMK, tetapi mudah-mudahan PMK ini adalah PMK yang levelnya ringan, yang mutasi atau tingkat penyebarannya tidak terlalu tinggi dan tingkat kematiannya pada hewan rendah" tandasnya pada Selasa (10/5/2022) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan





(Dirjen PKH) Nasrullah mengatakan, hasil laboratorium menunjukkan beberapa ternak yang terkonfirmasi positif PMK memiliki tingkat kematian yang rendah. "Alhamdulillah sampai hari ini (10/5/2022) kematian sangat rendah hanya 1,1 persen dari jumlah ternak yang terinfeksi virus PMK ini" bebarnya.

Nasrullah menambahkan, berbagai langkah penanggulangan PMK yang dilakukan pemerintah telah memberi hasil positif di lapangan, bahkan tingkat kesembuhan hewan ternak yang terinfeksi menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.

"Hasil lapangan hari ini (10/5/2022) kami melihat ada kemajuan yang berarti, dengan pemberian obat sejak

kasus pertama di 28 April sudah banyak hewan ternak yang menuju ke sehat. Ini belum menggunakan vaksin, baru obat-obat yang kita berikan sesuai rekomendasi kesehatan hewan, dan kami melihat sendiri di satu kandang disini sudah ada beberapa hewan yang sudah mulai makan, berdiri dan menuju ke sehat," jelasnya.

Melalui pendataan dan pemantauan di lapangan, Nasrullah menyebut bahwa jumlah hewan ternak yang terkonfirmasi sakit PMK pada Selasa (10/5/2022) sebanyak 200 ekor, mati empat ekor dan sembuh 12 ekor. Meski perlu diperkuat dengan hasil laboratorium lanjutan, angka ini menunjukkan tingkat keganasan virus PMK berada pada level yang rendah.



Terkait pengaturan serta pengawasan lalu lintas hewan ternak dan penetapan gugus tugas penanganan PMK secara nasional, Nasrullah menyebut bahwa Kementan telah menetapkan sejumlah kebijakan melalui surat penetapan maupun surat edaran Menteri Pertanian.

Pengawasan dan pengaturan lalu lintas hewan ternak juga dilakukan di masing-masing daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Ia berharap upaya yang dilakukan ini dapat mencegah kepanikan masyarakat serta memperkecil kesempatan bagi pihak yang ingin berspekulasi.

"Untuk pemotongan tetap dilakukan di pemotongan hewan dan dilakukan secara ketat, sudah ada surat edaran Menteri Pertanian terkait penanganan pemotongan hewan yang berada di rumah potong hewan" ujarnya.

Sementara itu, Kementan gerak cepat mengirimkan logistik kesehatan berupa Vitamin, Antibiotik, Antipiretik, Desinfektan dan APD ke beberapa wilayah yang diduga terjangkit PMK. "Mulai 7-12 Mei 2022 kami

sudah melakukan pengiriman logistik tahap satu ke beberapa provinsi," ungkap Nasrullah di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Dia menyebutkan, pada 16 Mei 2022 lalu, Kementan kembali melakukan pengiriman logistik tahap ke-2 untuk wilayah yang diduga terjangkit PMK termasuk Jawa Timur dan Aceh. Menurutnya keseluruhan obat-obatan yang telah Kementan kirimkan sebesar Rp. 534,29 juta dan pengiriman berikutnya akan dilakukan pada 18 Mei 2022.

"Begitu ada wabah penyakit PMK, kami bersama-sama dengan Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi, sehingga mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan untuk dapat mengendalikan penyebaran wabah PMK," ujar Nasrullah.

Dirjen PKH menyampaikan, pengendalian penyebaran PMK menjadi mutlak yang harus dilakukan agar segera ditangani. Menurutnya, saat ini hewan yang terinfeksi telah diberikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik, dan penguatan imun. Kondisi terakhir pada



hewan ternak yang telah diberikan obat dan vitamin juga sudah mulai membaik.

"Alhamdulillah pemberian dalam bentuk Vitamin, Antibiotik, Antipiretik, Desinfektan dan APD untuk petugas hasilnya jauh lebih baik, seperti hewan yang meler mulai segar dan yang tadinya tidak bisa berdiri kini sudah berangsur normal. Pemberian desinfektan juga sudah kita sarankan di kandang dan area



pemeliharaan,” ujar Nasrullah.

Sedangkan Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin mengimbau masyarakat, khususnya para peternak untuk melakukan langkah pencegahan sebagai antisipasi penyebaran PMK. Beberapa langkah itu di antaranya tidak memasukkan ternak baru, terutama dari daerah wabah dan membatasi lalu lintas orang yang keluar masuk lokasi kandang.

“Penyemprotan kandang, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kerja dengan disinfektan perlu dilakukan secara rutin. Kemudian peternak diimbau tidak menjual ternaknya yang sakit karena tingkat kematian pada hewan dewasa relatif rendah (1-5%), walau pada ternak berusia muda bisa lebih tinggi,” ujarnya dalam siaran pers tertulis pada Senin (30/5/2022).

Dia juga menyarankan agar peternak melakukan upaya untuk meningkatkan imunitas ternak dengan memperbaiki mutu pakan dan memberikan terapi suportif, obat hewan seperti vitamin dan mineral. “Para peternak segera melaporkan kepada petugas peternakan setempat jika ada ternak yang menunjukkan gejala klinis mengarah pada PMK,” tandasnya.

Di sisi lain, Kementan sudah menyiapkan tenaga medis terlatih yang tanggap tangani PMK. Untuk mendukung hal tersebut, Kementan melakukan ‘transfer of knowledge’



atau transfer pengetahuan kepada SDM peternakan melalui pelatihan pengendalian PMK.

Mentan Syahrul menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Pelatihan Pengendalian PMK. Karenanya, masyarakat tidak perlu panik karena PMK bisa ditanggulangi.

“Pelatihan ini memiliki arti penting sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan dan menangani PMK melalui peningkatan kualitas kompetensi SDM Pertanian/ Peternakan, para peserta pelatihan yang meliputi Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Koordinator BPP, Penyuluh Peternakan, dan Pengelola P4S,” katanya saat membuka Pelatihan Pengendalian PMK, Kamis (12/5/2022).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan, melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013, PMK telah ditetapkan sebagai salah satu penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang bersifat eksotik.

“Penyakit ini berpotensi muncul dan menimbulkan kerugian ekonomi yang disebabkan kematian ternak dan tingginya angka kesakitan, adanya hambatan perdagangan, terganggunya industri pariwisata, operasional pemberantasan penyakit, serta gangguan terhadap aspek sosial budaya dan keresahan masyarakat,” katanya.

Dedi juga menegaskan, BPPSDMP akan memanfaatkan berbagai kegiatan ‘transfer of knowledge’ untuk mendukung upaya penanggulangan PMK. Diharapkan melalui kegiatan ini

Dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit mulut dan kuku (PMK), sekaligus mengurangi penyebaran PMK. “Untuk menanggulangi PMK ada berbagai cara, ada berbagai teknik, ada berbagai pendekatan. Jadi pelatihan ini sangat penting dan urgent,” ujarnya.

### Optimalkan Puskesmas

Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang ada di tiap kecamatan. Pengoptimalan ini, menurut SYL penting dilakukan untuk menekan penularan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Keberadaan Puskesmas harus bisa mendeteksi penyakit hewan seperti PMK. Puskesmas kita dorong untuk berperan optimal sebagai unit terdepan dalam mempercepat proses pelayanan dan penanganan





kehatan hewan,” ujar SYL dalam koordinasi penanganan PMK, Rabu (25/5/2022).

Menurut Mentan, keberadaan puskesmas sangat vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penularan kontak langsung anatar hewan ke hewan atau manusia ke hewan. Selain itu, keberadaan puskesmas selama ini mampu mendekatkan peternak dengan petugas kesehatan hewan.

“Saya yakin puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan hewan yang optimal untuk meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan ternak, sehingga PMK ini segera dapat diatasi,” katanya.

Sementara itu, Puskesmas selalu siap melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya saat ini dalam memperkuat penanganan wabah PMK pada hewan ternak. Salah satu petugas kesehatan hewan, Nandan Iskandar bersama tim Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Jabar di Puskesmas Surade, telah melakukan upaya keras di lapangan dalam pelayanan kesehatan hewan. Khusus ternak yang berisiko tertular, tim kesehatan sudah memberikan vitamin A,D dan E pada ternak sapi milik para peternak di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jabar.

“Pemberian vitamin tersebut bertujuan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ternak ditengah penyebaran PMK yang sedang terjadi. Tim Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi secara aktif juga melaksanakan layanan kesehatan terhadap ternak rentan sebagai upaya #SiagaPMK agar penyebaran penyakit dapat dicegah dengan meningkatkan kesehatan ternak di wilayahnya,” kata Nandan yang juga anggota Paramedik Veteriner Indonesia (Paveti) DPD Jabar.

Perlu diketahui, berdasarkan amanat Undang-Undang No18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

disebutkan bahwa Puskesmas melakukan tugas utama sebagai ujung tombak kesehatan hewan yang strategis dalam mendukung Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Sikeswannas).

Menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah, dari data per Januari 2022, Indonesia memiliki 1.588 unit Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. “Terdapat juga 89,7 persen kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas,” tandasnya.

### Luruskan Disinformasi

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan) Nasrullah menegaskan, adanya kekeliruan informasi yang beredar di media tentang jutaan sapi terjangkau PMK. Kesalahan terjadi akibat pembacaan tabel data populasi dan hewan sakit, menyebabkan adanya persepsi keliru ini. “Kami akan perbaiki model tabel yang dipublikasikan pada masyarakat, agar tidak ada kekeliruan interpretasi,” tegasnya di Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Secara rinci Nasrullah menyampaikan kembali data yang diterbitkan pemerintah pada saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI per 22 Mei 2022, bahwa kejadian PMK terjadi pada 16 propinsi, dengan jumlah hewan sakit 20.723 ekor (0,38 persen) dari total populasi ternak 5,4 juta ekor di wilayah tersebut. “Pemerintah berupaya menekan angka kesakitan dan penyebarannya. Kita apresiasi langkah satgas daerah dan Polri yang sangat proaktif di lapangan,” tambahnya.

Kabar baiknya, lanjut Nasrullah, perkembangan ternak sakit yang berhasil diobati sangat menggembirakan. Setidaknya 33,29 persen hingga diatas 50 persen di daerah tertentu. Strategi zonasi atau melokalisir kasus hanya pada kandang yang sakit, efektif membantu PMK

tidak meluas.

“Kami terus bekerja keras membatasi penyebaran PMK dengan pembatasan lalu lintas ternak dari wilayah wabah. Khusus hewan sakit kita obati terutama yang bergejala klinis. Mohon dukungan media dan masyarakat agar PMK dapat segera teratasi,” tandasnya.

### Produksi Vaksin

Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kementan saat ini sedang proses pembuatan vaksin untuk PMK. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga saat melakukan kunjungan kerja ke Pusvetma, Surabaya, Jumat (27/5/2022).

“Bapak Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo telah mengintruksikan langsung kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar Pusvetma segera memproduksi vaksin setelah munculnya kasus kejadian PMK di Jawa Timur, sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu,” ungkap Kuntoro.

Kepala Pusvetma Edy Budi Susila menjelaskan, proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusvetma telah berlangsung sejak Mentan menginstruksikan diproduksi kembali vaksin PMK.

Ia menjelaskan, proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusvetma pernah dilakukan untuk membebaskan Indonesia dari PMK pada 1983-1986. Bertolak pada pengalaman tersebut, ia meyakini Pusvetma dapat mengembangkan vaksin dalam negeri

guna pengendalian PMK ke depan.

Lebih lanjut Edy sampaikan, seiring dengan kejadian wabah masuknya PMK, proses pengembangan produksi vaksin di Pusvetma dimulai kembali dan saat ini telah memasuki purifikasi isolate dan fase ke-6. “Proses pembuatan vaksin PMK ini dengan menggunakan teknologi tissue culture dengan sel BKH 21. Vaksin bersifat inaktif dan diformulasikan dengan adjuvant,” imbuhnya.

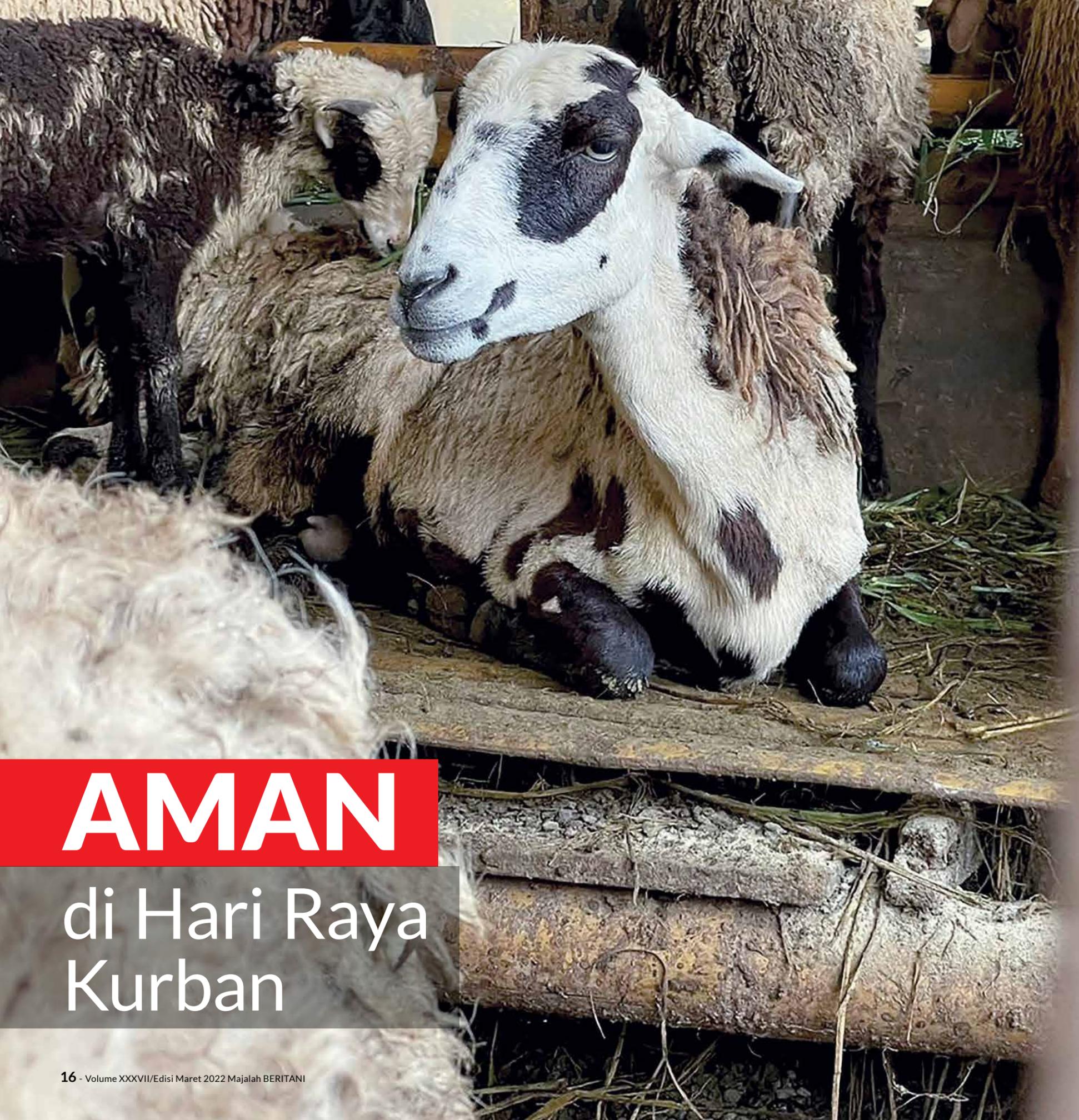
### Ramuan Jamu & Doa

Meluasnya penyebaran PMK di Jatim, turut menjadi perhatian para peternak di sentra sapi Madura. Di Pamekasan, selain pakan yang spesial, mereka memberikan jamu khusus madura sebagai penguatan imun tubuh hewan agar tetap sehat dan kuat. Semua bahanya terbuat dari rempah bahan alami seperti kunyit dan madu.

Salah satunya, KH Ilzamuddin yang saat ini mengembangkan 72 ekor sapi di area pondok pesantrennya. Kyai muda ini telah mengembangkan pakan ternak dengan teknologi pakan modern dan khusus kesehatan didampingi Puskesmas.

Ilzamuddin memberikan tips agar kesehatan sapi tetap terpantau melalui tenaga medis. Caranya terus berkonsultasi pada dokter hewan yang ada di Puskesmas. “Terutama sih kita harus menjaga kebersihan kandang agar tetap bersih. Saya juga membatasi tamu yang masuk ke kandang untuk mencegah PMK,” ujar Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Pengurus Cabang Kabupaten Pamekasan, Madura, Sabtu (28/5/2022). **(tim humas)**





# AMAN

## di Hari Raya Kurban

**K**ementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak memengaruhi stok ternak untuk perayaan Iduladha atau Hari Raya Kurban pada tahun ini. Stok ternak ruminansia secara nasional disebut sangat mencukupi. "Mengacu pada data nasional tahun lalu, populasi sapi potong mencapai 18 juta, kerbau 1,2 juta, kambing 19,2 juta, dan domba 17,9 juta ekor," ungkap Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri dalam keterangan pers, Jumat (13/5/2022).

Melihat data ini, dirinya menilai stok untuk pasokan hewan kurban tahun ini pun seharusnya aman. Apalagi bila bercermin pada penyelenggaraan kurban pada 2021, total penyembelihan hewan kurban saat itu hanya sebanyak 1,7 juta ekor yang terdiri dari 609,5 ribu ekor sapi, 14,2 ribu ekor kerbau, 281,3 ribu ekor kambing, dan 750,6 ribu ekor domba.

Kuntoro pun menyebutkan tingkat kematian ternak akibat PMK tergolong sangat kecil, yaitu sekitar 2 persen. "Sehingga secara populasi, stok ternak kita untuk kebutuhan pemotongan hewan kurban masih cukup aman," terangnya.

Selain ketersediaan stok ternak untuk penyelenggaraan kurban nanti, Kuntoro juga meminta masyarakat tenang dan tidak perlu khawatir tentang kemungkinan penularan PMK ke manusia. "PMK bukan penyakit yang dapat menular atau membahayakan kemanusiaan. Daging ternak yang positif PMK masih dapat dikonsumsi selama dimasak dengan benar," jelasnya.

Memahami kekhawatiran publik terhadap dampak PMK, Kuntoro menyebutkan pihak Kementan akan terus menyosialisasikan pencegahan penularan PMK melalui pemotongan hewan kurban yang baik di daerah wabah, tertular, terancam, dan bebas. "Kami terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, ormas keagamaan, maupun pemerintah daerah untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah kurban tahun ini agar berjalan lancar," ungkapnya.

Di lain pihak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan gerak cepat melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga antara lain dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kantor Staf Presiden untuk mempersiapkan pelaksanaan kurban dalam kondisi wabah PMK pada Jumat (13/4/2022).

Direktur Jenderal PKH yang diwakili Agung Suganda, selaku Ketua Bidang Sosial Budaya dan Kehumasan Gugus Tugas Penanganan PMK Kementan menyampaikan, koordinasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan kurban khususnya dalam situasi wabah PMK ini sangat penting.

Menurutnya, hal ini karena diharapkan pelaksanaan kurban pada 1443 H/2022 M ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi aspek kesehatan hewan, serta kesejahteraan hewan. "Kita berharap dari koordinasi ini akan dapat kita tetapkan langkah-langkah dan tindakan untuk proses pengamanan hewan kurban dari syarat Syar'i bisa berjalan, demikian pula dari sisi Kesehatan hewan dan keamanan daging kurban pun tetap terjaga," jelasnya.

Agung juga menyampaikan, untuk mendorong kewaspadaan dan pengendalian PMK diharapkan Kemendagri dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar segera dapat merespon

cepat informasi-informasi yang disampaikan oleh Kementan. Menurutnya, langkah-langkah penanganan di daerah sangat tergantung dari respon cepat para pimpinan di daerah, termasuk penentuan lokasi-lokasi untuk pemotongan hewan kurban yang seharusnya dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dengan pengawasan dari dokter hewan.

Lebih lanjut Agung menyebutkan, Kementan segera berkirim surat ke MUI terkait permintaan pertimbangan fatwa untuk pemotongan hewan kurban dalam kondisi wabah PMK seperti saat ini. Pihaknya juga akan menghadirkan ahli-ahli dalam pemotongan ternak sebagai bahan pertimbangan MUI. Selain itu, Kementan juga akan bersurat ke Kemendagri terkait permintaan dukungan Pemda untuk mekanisme perizinan pemotongan hewan kurban.

"Persiapan pelaksanaan hewan kurban ini harus kita pikirkan bersama karena merupakan kegiatan besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, sehingga jika tidak kita tangani dengan tepat dikhawatirkan akan memperluas penyebaran penyakit," ujarnya.

Pujo Setio, asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kemenko Perekonomian

mengatakan, mitigasi risiko PMK yang terkoordinir secara lintas sektor sangat penting, terutama dengan memperhatikan lalu lintas ternak antar wilayah dan tetap memperhatikan kestabilan ketersediaan/pasokan ternak.

Terkait dengan hal tersebut, perwakilan dari Kemendagri juga berkomitmen dalam penanganan wabah PMK melalui unsur pemerintah daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 440/2530/SJ/2022 tentang Dukungan dan Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak.

Harjo Suwito selaku perwakilan Kemenag menjelaskan, hewan kurban yang dijual dan akan dipotong harus tetap memenuhi syariat Islam. Ada empat hal yang tidak boleh dalam hewan kurban, yaitu tidak boleh cacat mata, tidak boleh sakit, tidak boleh pincang dan cacat kaki, serta tidak boleh kurus. "Pusat penjualan hewan kurban harus dilakukan pengawasan yang ketat, sehingga hewan kurban tetap sehat," tandasnya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda menambahkan, pihaknya telah menerbitkan Fatwa Nomor 37/2019 tentang Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban dalam Bentuk Olahan. "Apabila diperlukan adanya Fatwa MUI terkait



pelaksanaan kurban dalam kondisi wabah PMK perlu adanya koordinasi lebih lanjut antara Kementan dan MUI," ujarnya.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma'arif menyampaikan, sosialisasi pencegahan penularan PMK khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan kurban sangat penting baik di lokasi penjualan dan tempat pemotongan yang dilaksanakan di rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) maupun di luar rumah potong hewan ruminansia RPH-R. "Kami terus

berkoordinasi dengan pihak Kemenag, MUI, ormas keagamaan maupun dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam pelaksanaan kurban ini," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Ditjen PKH Kementan terus melakukan pengawasan ketat terhadap semua hewan ternak yang akan dijadikan kurban. Dirjen PKH Nasrullah mengatakan, pengawasan tersebut di antaranya mengatur persyaratan teknis tempat penjualan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan kurban baik



yang dilakukan di RPH maupun diluar RPH. “Kemudian mengatur prosedur pematangan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban,” ujar Nasrullah dalam rapat koordinasi penanganan PMK, Rabu (25/5/2022). Berikutnya, kata Nasrullah, Kementan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem yang didampingi dokter hewan atau paramedik veteriner. Di sisi lain Kementan terus memperketat pengiriman lalu lintas ternak sampai dengan tata laksanaanya. “Langkah ini penting dilakukan mengingat pada saat hari raya nanti sekitar 1,5 juta hewan kurban akan dipotong,” katanya.

Sebagaimana diketahui, kementan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300M5/2022 pada 18 Mei 2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pematangan Hewan dalam Situasi Wabah PMK. Dalam surat edaran tersebut, mitigasi dan pengawasan harus dilakukan dalam mencegah penyebaran PMK.

“Dalam upaya mitigasi penyebaran PMK, maka tempat penjualan hewan kurban harus mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan

kewenangannya,” katanya.

Nasrullah menambahkan, upaya lainya adalah melakukan koordinasi dengan majelis ulama Indonesia untuk dapat memberikan fatwa dan himbauan tata laksana perasaan idul adha dan kurban. “Inilah saatnya semua orang melakukan pencegahan penularan PMK,” tandasnya.

Di Semarang, Kementan melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) menyatakan kesiapannya dalam mendukung tekad Jawa Tengah (Jateng) untuk menyediakan hewan kurban yang sehat. “Penanganan serius dengan melakukan lockdown zonasi satu hal yang mutlak dilakukan. Dan ini perlu koordinasi dan kolaborasi yang kuat,” kata Kepala Barantan Bambang saat kunjungan ke lokasi karantina hewan ternak yang diduga terpapar PMK di Desa Gunung Pati, Semarang.

Sebanyak 10 sapi milik Kelompok Tani Ternak Mekar Sari tengah dilakukan pengobatan dan karantina yang ketat dibawah pengawasan para dokter hewan dari Dinas Peternakan Jateng. “Alhamdulillah, kondisi sapi semakin membaik, harapannya dapat kembali sehat. Sementara ini kami lakukan karantina secara ketat,” jelas Kepala Dinas Peternakan Jateng drh Agus Wariyadi. **(tim humas)**



Ketika Mentan Terjun ke

# Kawasan Terjangkit

Untuk memantau ke lapangan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) terjun langsung ke wilayah terjangkit penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Di Surabaya, Kementan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berupaya mencegah penyebaran PMK pada hewan. "Kita harus maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa penyakit ini tidak menular pada manusia, dan pernyataan ini diperkuat oleh Menkes (Menteri Kesehatan) saat ratas (rapat terbatas) bersama Presiden dan ini menjadi hal yang sangat penting," ungkap Mentan SYL usai Rapat koordinasi terkait PMK bersama Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (9/5/2022).

Selain mendukung penuh upaya pemberantasan dengan menugaskan tim untuk mengecek kondisi lapangan, Mentan juga mengatakan bahwa pihaknya melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya tengah melakukan penelitian lanjutan untuk memastikan tingkat dan jenis serotype PMK yang teridentifikasi di sejumlah daerah di Jatim ini.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta agar media membantu upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait PMK. Ini agar tidak ada kekhawatiran berlebih yang akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat terkait penyakit ini.

Mentan Syahrul juga gerak cepat turun ke lapangan dan mengunjungi Kabupaten Gresik sebagai salah satu wilayah yang terkonfirmasi positif PMK. Usai mengunjungi peternak dan posko penanganan PMK



di daerah tersebut, SYL memastikan penanganan dan penanggulangan PMK di Jatim berjalan baik dan terkendali.

Ia menyebutkan, Kementan akan mendukung penuh upaya berjenjang yang dilakukan pemda dalam penanganan dan pengendalian PMK di wilayah masing-masing. "Saya bersama seluruh dirjen di Kementan dan Forkopinda beserta Bupati Gresik dan empat bupati lainnya kami hadir di lapangan. Ini menandakan apa yang diminta Bapak Presiden agar seluruh kekuatan di pemerintah pusat dan daerah secara serius melakukan penanganan yang maksimal," ujarnya di Balai Desa Sembung, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik, Selasa (10/6/2022).

Di Daerah Istimewa (DI) Aceh, Mentan SYL mengunjungi Desa Paya Meta, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/5/2022). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau sapi yang terinfeksi virus PMK.

Menurut SYL, mitigasi dan antisipasi Pemprov Aceh bersama Pemkab Aceh Tamiang dan Satgas dalam menghadapi penyebarluasan virus PMK patut diapresiasi. Selain Jatim, DI Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah wabah PMK. Penetapan ini buntut terinfeksinya 2.555 ekor sapi dan 13 ekor sapi yang terkonfirmasi mati.

Bupati Aceh Tamiang Mursil yang mendampingi Mentan dalam kunjungan tersebut mengungkapkan bahwa lockdown menjadi pilihan saat ini. "Sapi-sapi

dari Aceh Tamiang tidak boleh keluar dan sapi dari luar tidak boleh masuk ke sini. Demi kepentingan bersama," tandasnya.

Kemudian di Jawa Tengah (Jateng), Mentan SYL menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemprov Jateng dan beberapa pemerintah kabupaten, sekaligus meninjau ternak sapi di Boyolali untuk melakukan pencegahan penyebaran wabah PMK.

SYL menegaskan, perlunya langkah cepat dan sinergi antara pemerintah pusat bersama pemda dan stakeholder, dengan meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat recovery ternak yang teridentifikasi positif PMK. Kementan menyiapkan bantuan obat hewan, desinfektan dan APD, serta telah membentuk gugus tugas nasional penanganan PMK.

"Wabah PMK itu ada dan kita lihat tren penyembuhan yang sangat positif. Kecepatan kita bereaksi mengambil tindakan itu menentukan hasil," ujarnya pada Rapat Koordinasi PMK di Kantor Bupati Boyolali, Jumat (13/5/2022).

Mentan SYL mendapat laporan kondisi terkini situasi PMK di Jateng mengalami hasil yang membaik. Karena itu, dia memberi apresiasi Gubernur Jateng, Bupati, DPR dan Muspida sudah turun tangan dengan cepat. "Saya lega melihat perkembangan ternak di Klaten dan Boyolali yang memiliki populasi ternak sangat besar, terutama susu, tidak boleh terkontaminasi PMK," pintanya.



Di Jawa Barat (Jabar), Mentan SYL bersama Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno melihat secara langsung pengobatan terhadap hewan ternak yang terkonfirmasi positif PMK di Kabupaten Sumedang. Menurutnya, pengobatan ini merupakan upaya pemerintah dalam merespon PMK secara cepat agar tidak menular terhadap hewan lainnya

“Proses yang saat ini terus berjalan antara lain melakukan intervensi obat-obatan seperti vitamin, antibiotik dan termasuk obat herbal yang biasa dibuat dengan kearifan lokal daerah tertentu. Alhamdulillah yang dipakai ternyata penyembuhannya sangat cepat,” ujar SYL, Rabu (18/5/2022).

Di Banten, Mentan Syahrul sigap langsung meninjau peternakan sapi, khususnya mendekati Iduladha. “Kita bersyukur kepada Allah dari laporan kadis (kepala dinas) dan apa yang kita lihat di Banten begitu menggembirakan. Saya sangat mengapresiasi dan kita harus terus menjaga kondisi ini,” ujarnya usai meninjau peternakan sapi Rumah Qur’an Lubawi, Tangerang Selatan, Kamis (19/5/22).

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Banten Agus Tauchid mengkonfirmasi pada 19 Mei 2022 di Banten dari delapan kabupaten/kota tidak ada kasus gejala positif wabah PMK. “Sebelumnya memang kondisi terakhir dua ekor sapi suspect terkonfirmasi hasil PCR positif, namun saat ini setelah dirawat, data sudah menunjukkan perkembangan positif sapi dinyatakan sembuh,” jelasnya.

Di Lampung, Mentan menggelar koordinasi pengendalian dan pencegahan PMK di Desa Mulyajaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Bara. Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemprov Lampung serta para peternak yang tengah melakukan proses penyembuhan.

Menurut SYL, kegiatan tersebut merupakan respon cepat pemerintah atas adanya laporan penyebaran wabah PMK di desa tersebut. Pemerintah langsung bergerak cepat dengan memberikan bantuan obat, antibiotik, dan vitamin.

“Alhamdulillah banyak hewan ternak yang sudah sembuh, sudah lincah kembali, sudah bisa makan dan hidungnya tidak meler lagi. Tapi saya mengingatkan agar tetap menerapkan Prototap-prototap yang berlaku. Catatannya 14 hari harus mendapat pengawasan,” ujarnya, Minggu (22/5/2022).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang Nazaruddin mengatakan, penanganan wabah PMK sudah dilakukan secara maksimal sesuai arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementan. **(tim humas)**



# Perketat Pengawasan, Cegah Penyebaran

Dalam upaya cegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan upaya penanganan dengan adaptasi yang baik dan kolaborasi yang serius antar lembaga.

Karena itu, Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan selaku lembaga pengawasan di pelabuhan, bandara dan perbatasan antar negara, menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian PMK.

Kepala Barantan Bambang menginstruksikan unit pelaksana teknis (UPT) karantina pertanian di seluruh wilayah Indonesia agar meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak untuk mencegah penyebaran masuk dan menyebarnya PMK ke seluruh wilayah Indonesia.

"Langkah pencegahan pertama adalah untuk tidak memberikan sertifikasi pada pengeluaran dan transit media pembawa virus PMK, yakni sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya, dan hewan rentan lainnya, serta daging, kulit mentah, produk susu, semen, dan embrio dari hewan-hewan tersebut yang berasal dari Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto, serta daerah lain yang terindikasi terdapat kasus penyakit PMK," jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah setempat, agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) atau Sertifikat Sanitasi terhadap media pembawa virus PMK jika di wilayah kerjanya terindikasi ada kasus PMK. Sementara itu, penerbitan SKKH bagi media pembawa virus PMK yang berasal dari daerah yang belum ada kasus



PMK harus tercantum pernyataan bahwa hewan atau produk hewan berasal dari daerah yang belum terdapat kasus/kejadian PMK.

"Untuk hewan impor, Health Requirement (HR) sebagai persyaratan mutlak pemasukan hewan wajib ada dan pejabat karantina melaksanakan tindakan karantina sesuai dengan HR. Masa karantina untuk pengeluaran antararea dan pemasukan dari negara lain ini dilakukan selama minimum 14 hari," ujar Bambang

Selain itu, tindakan perlakuan berupa disinfeksi dan desinsektisasi wajib dilakukan terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lain, hewan rentan lainnya, dan alat angkutnya di tempat pemasukan, tempat pengeluaran, tempat transit, instalasi karantina hewan, dan tempat tindakan karantina hewan, serta di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna dalam video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/5/2022) telah memerintahkan Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk memberlakukan lockdown zonasi untuk mencegah mutasi wabah PMK yang menimpa hewan ternak dari satu wilayah ke wilayah lain.

Sementara itu, pengawasan lalu lintas hewan salah satunya di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Barantan bersama jajaran Polri melakukan pengecekan terhadap semua hewan baik yang datang dari Pulau Sumatera maupun yang keluar dari Pulau Jawa.

Mentan SYL memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Bahkan fungsi teknis yang lainnya sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).



"Di Cilegon kita bisa melihat adanya aplikasi digital untuk mempermudah proses yang ada. Tempat ini juga melakukan pemeriksaan secara maksimal yang dibantu oleh dokter hewan sehingga tidak boleh ada kontaminasi dari PMK yang bisa kita abaikan. Bahkan sample darah dan pemeriksaan lab bisa kita maksimalkan di tempat ini," ujarnya.

Pemeriksaan berikutnya, lanjut SYL, semua hewan yang masuk ke Pulau Jawa harus melalui pemeriksaan, dimana semua mobil yang mengangkut hewan terlebih dulu dilakukan desinfeksi. Walaupun ada hewan yang bermasalah makan Kementan telah menyiapkan tempat instalasi karantina hewan.

Di Surabaya, Mentan Syahrul telah menetapkan beberapa kabupaten di Jawa Timur (Jatim) sebagai daerah wabah PMK. Ketentuan yang tertuang dalam Kepmentan No. 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 memiliki konsekuensi per 9 Mei 2022 tidak ada hewan ternak rentan PMK yang boleh keluar dari, masuk ke, ataupun transit di wilayah Jatim.

Karena hal itu, Karantina Pertanian Surabaya tidak menerbitkan surat persetujuan bongkar terhadap 736 ekor sapi asal Kupang, NTT di Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (11/5/2022). Menurut informasi dokter hewan karantina, sapi-sapi dengan tujuan akhir Bekasi tersebut rencananya akan diturunkan dari KM Calypso di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, lalu melanjutkan perjalanan ke Bekasi via darat.

"Karena adanya status daerah wabah PMK di Jatim, kapal ternak tersebut diminta mengalihkan trayeknya

langsung menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapalnya hanya boleh berlabuh saja, tidak boleh bersandar dan sapi-sapi tidak boleh diturunkan," ujar Tri Endah dokter hewan karantina wilker Tanjung Perak melalui keterangan tertulis, Rabu (16/5/2022).

Petugas karantina menjelaskan selama tiga hari di dalam kapal, sapi-sapi diperiksa kesehatannya oleh pejabat karantina hewan serta diberi pakan dan minum oleh pemilik. Pejabat karantina hewan di wilayah kerja Tanjung Perak terus siaga melakukan pengawasan untuk memastikan kapal tidak bersandar, dan tidak ada sapi yang diturunkan.

Di Sragen, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Bambang memperketat pengawasan hewan rentan PMK (HRP) dari daerah tertular dengan mngunjungi pos lalu lintas kesehatan ternak atau check point di Jatim dan Jateng. Kunjungan dilakukan guna berkoordinasi penguatan pengendalian dan penanggulangan PMK di daerah tertular. "Ini sejalan dengan perintah Bapak Menteri Pertanian agar Barantan mendukung pemma dalam memperkuat pengawasan," katanya melalui keterangan tertulisnya, Minggu (29/5/2022).

Imam Suciarto, petugas pasar Check Point Hewan di Banaran, Sragen, Jateng menyebutkan bahwa lalu lintas hewan ternak ramai saat pasar hewan pahing. "Dengan kondisi PMK saat ini, waktu pasar sudah mulai on-off, ternak juga harus dipastikan sehat dan bukan dari wilayah yang tertular," jelasnya.

Senada juga disampaikan petugas check point ternak di Widodaren, Ngawi yang merupakan perbatasan Jateng

dengan Jatim. Pasar hewan yang biasa digelar saat hari pasaran legipun sudah mulai diperketat.

Di lain waktu, Kepala Barantan Bambang secara khusus melakukan audiensi ke Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta di Surabaya, Jumat (27/5/2022). Bambang mengapresiasi dukungan jajaran Polda Jatim atas pengawasan yang diberikan kepada petugas Karantina Pertanian di lapangan dalam rangka pengawasan kesehatan dan keamanan hewan sejak pemberlakuan wabah PMK di empat kabupaten di Jatim oleh Menteri Pertanian pada 5 Mei 2022.

"Kondisi wabah ini perlu mendapat dukungan penuh. Tugas kami adalah menjaga daerah bebas tetap bebas, sementara yang tertular harus kita isolasi agar tidak menyebar," ujarnya.

Kapolda Jatim menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan Barantan. Dalam mendukung check point, pihaknya siap memberikan

pengawasan, termasuk dalam penegakan hukum.

Di Semarang, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menginstruksikan jajarannya untuk menjaga lalu lintas hewan ternak di daerah yang berbatasan langsung dengan Jatim. Langkah pencegahan penting dilakukan sebagai upaya bersama dalam mewaspadai PMK yang saat ini tersebar di DI Aceh dan Jatim.

"Sekarang kita siaga kesehatan hewan, wabil khusus penyakit mulut kuku (PMK). Ini sudah ada di Jawa Timur maka kita harus border perbatasan," ujarnya dalam kegiatan evaluasi arus mudik-balik bersama Kapolda dan Pangdam IV/Diponegoro di Kantor gubernur, Rabu (11/5/2022).

Dikatakan Ganjar, penularan PMK bukan tidak mungkin masuk ke wilayah Jateng apabila pengawasan dan kerja sama antar pihak tidak dilakukan secara baik. Karena itu, sesuai arahan dari Kementan, pemusnahan dapat dicegah apabila hewan yang terpapar segera mendapat pengobatan. **(tim humas)**



# Menyikapi Kemunculan

di Jatim dan Aceh

Menyikapi kejadian munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur (Jatim) seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan, serta Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kementerian Pertanian (Kementan) secara aktif telah melakukan upaya pencegahan terjadinya penyebaran dan tracing penyakit ini.

"Dua Laboratorium utama kita, Balai Besar Veteriner Wates dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya sebagai Lab rujukan PMK telah dari awal aktif melakukan tracing kasus ini. Saat ini kami koordinasi dengan pemda Jawa Timur untuk melakukan lockdown zona wabah," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Dia menjelaskan, pada awalnya kasus ini diketahui setelah hasil pemeriksaan PCR menunjukkan positif PMK, dan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Jatim dan empat bupati wilayah kasus PMK.

Adapun langkah darurat yang disiapkan untuk penanganan antara lain penetapan wabah oleh Menteri Pertanian berdasarkan surat dari Gubernur dan rekomendasi dari otoritas veteriner nasional sesuai dengan PP No 4/2014, pendataan harian jumlah populasi yang positif PMK, pemusnahan ternak yang positif PMK secara terbatas, dan penetapan lockdown zona wabah tingkat desa/kecamatan di setiap wilayah dgn radius 3-10 km dari wilayah terdampak wabah.

Kemudian, melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas



ternak, pasar hewan dan rumah potong hewan, melakukan edukasi kepada peternak terkait SOP pengendalian dan pencegahan PMK, menyiapkan vaksin PMK, pembentukan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten, dan pengawasan ketat masuknya ternak hidup di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang belum bebas PMK oleh Badan Karantina pertanian.

Selanjutnya Nasrullah menjelaskan, sejak Jumat (6/5/2022), tim pusat dan daerah sudah bekerja di lapangan. Harapannya dapat melokalisir zona penyakit dan tidak menyebar ke wilayah sentra sapi lainnya.

"Masyarakat kita mohon bantuan dan kerjasamanya untuk tidak memindahkan atau memperjualbelikan sapi dari daerah wabah ke daerah yang masih bebas. Kita tangani bersama dan lokalisir wilayahnya," ujarnya.

Di tempat terpisah, Bupati Aceh Tamiang, Mursil mengatakan, pemerintah melalui Kementan bergerak cepat menangani wabah PMK di wilayahnya. Saat ini, wabah ini sudah ditangani dengan



baik dan terkendali, sehingga masyarakat diimbau tidak panik. "Penyakit ini penyebarannya cepat, tapi diharapkan masyarakat tenang, tidak panik, penyakit ini bisa ditangani," ujarnya di Aceh, Kamis (12/5/2022).

Diketahui, wabah PMK di Kabupaten Aceh Tamiang terkonfirmasi tepatnya pada 11 Mei 2022. Mursil mengungkapkan, kabupatennya memiliki sebanyak 44.495 populasi sapi dimana 2.555 ekor sapi terinfeksi PMK dan 13 ekor mati.

"Alhamdulillah, semua stakeholder terlibat langsung untuk menanggulangi wabah ini. Mulai Pak Mentan, Dinas Peternakan Provinsi, Pemkab Aceh Tamiang sangat serius dalam penanganan wabah ini," ujarnya.

Mursil mengimbau para peternak yang sapinya terinfeksi dan mati untuk segera ditangani dengan baik sesuai standart yang telah ditentukan agar tidak menyebabkan penyebaran wabah PMK lebih luas lagi. Selain itu, untuk memutus rantai penyebaran, Pemkab Aceh Tamiang, menerapkan langkah lokalisasi.

"Lokalisasi atau lockdown menjadi pilihan saat ini. Sapi-sapi dari Aceh Tamiang tidak boleh keluar dan sapi dari luar tidak boleh masuk ke sini. Demi kepentingan bersama," imbuhnya.

Bupati Mursil juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan yang tanggap dan cepat dalam penanggulangan wabah PMK sehingga tidak berdampak secara luas di masyarakat. "Pak Mentan datang langsung ke Aceh Tamiang. Ini bukti keseriusan beliau untuk memastikan wabah ini tertangani dengan baik secara komprehensif," ucapnya.

Mentan Syahrul Yasin Limpo kembali menegaskan bahwa PMK tidak berisiko terhadap kesehatan manusia, namun harus tetap waspada dan perlu dilakukan penanggulangan wabah PMK dengan cepat.

"Yang perlu kita pahami PMK ini memang berbahaya bagi hewan, tetapi tidak menular atau tidak berisiko pada kesehatan manusia, untuk itu kita akan lakukan berbagai upaya untuk mengatasi PMK ini," tandasnya.

Anggota Komisi Ahli kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan Denny W. Lukman mengungkapkan, pencegahan meluasnya penyakit ini hal yang utama. Tapi pemenuhan kebutuhan daging masyarakat juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, pemotongan hewan ternak sebaiknya dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH).

"Ini penting karena RPH biasanya diawasi oleh pemerintah. Dimana di dalamnya pasti ditempatkan dokter hewan sebagai pemeriksa kesehatan hewan dan kesehatan daging serta pengawasan pemotongan sehingga bisa dipastikan, daging-daging tidak mengandung kuman-kuman yang berbahaya," ujar Denny.

Sebagai informasi, daging dari hewan ternak yang terinfeksi dapat dikonsumsi oleh manusia dengan pemotongan yang ketat di RPH dan organ terinfeksi harus dimusnahkan. **(tim humas)**

# Dari Dukungan Sampai Penghargaan

## Penanganan dan Percepatan Vaksin PMK

**G**erak cepat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada ternak di berbagai daerah mendapat apresiasi atau penghargaan dari kalangan Wakil Rakyat. Selain itu, Legislatif juga mendukung upaya Kementan melakukan percepatan produksi vaksin PMK untuk mencegah dan mengendalikan wabah PMK secara menyeluruh.

"Saya mensyukuri bahwa Bapak Mentan menginfokan sudah menemukan serotipe untuk virus ini, sehingga vaksin bisa segera diproduksi di dalam negeri dan dipastikan sudah selesai pada Agustus nanti. Semoga ini bisa segera kita laksanakan tentunya sasarannya adalah untuk ternak-ternak yang belum terinfeksi sedangkan yang sudah terinfeksi ini segera ambil langkah-langkah," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Hanan Rozak dalam rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dan Mentan di Senayan, Jakarta, Senin (23/5/22).

Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Hermanto juga memberikan dukungan yang sama untuk Kementan bisa segera melakukan percepatan produksi vaksin PMK. Upaya ini dinilai menjadi dukungan aktif Kementan untuk peternak utamanya menjelang Iduladha.

"Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Menteri bersama jajaran dalam waktu cepat bisa melakukan langkah-

langkah konkret dari Aceh, Jawa Timur sampai Indonesia bagian Timur. Ini sebuah langkah konkret," katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno turut pula mengapresiasi upaya Kementan dalam melakukan penanganan PMK secara cepat dan tepat. Upaya tersebut meliputi pemberian obat dan pendampingan terhadap para peternak yang dilakukan secara responsif

hampir di semua daerah.

"Saya selaku Wakil Rakyat terima kasih karena Pak Menteri dalam waktu satu minggu ini dapat menangani penyakit PMK secara cepat. Paling tidak kehadiran Pak Menteri itu memberikan semangat kepada rakyat kita untuk tidak cemas dan tidak ragu dalam menghadapi situasi ini," ujarnya, Rabu (18/5/2022).

Sutrisno mengatakan, secara tegas Mentan SYL juga terus meyakinkan rakyat bahwa penyakit PMK bukanlah penyakit yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Penyakit ini bisa disembuhkan melalui kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Ini termasuk pemimpin daerah yang ada di seluruh Indonesia.





Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung upaya Kementan dalam menangani wabah PMK yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur, Provinsi Aceh serta di Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto, Jatim.

Polri, kata Sigit, siap membantu melakukan pendampingan serta pengawasan hewan ternak sapi yang terpapar wabah PMK. "Polri juga akan bekerjasama dengan Dinas Peternakan daerah untuk membantu mengawasi penanganan penyakit PMK agar tidak terjadi pergeseran ke luar dari wilayah temuan," ujar Kapolri, Rabu (11/5/2022).

Sedangkan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan IPB University Dr Sri Murtini menegaskan, penularan PMK bisa melalui kontak langsung maupun udara. Karena itu, perlu penanganan tepat dan cepat melalui beberapa pola dan metode.

"Salah satunya dengan biosecurity alias pembatasan lalu lintas ternak. Artinya ternak yang sakit atau dari daerah yang sakit sebaiknya tidak keluar dari daerah tersebut," ujar Sri dalam diskusi yang digelar secara virtual, Sabtu (14/5/2022).

Di lain pihak, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Muttaqin mengatakan, pelayanan informasi publik terkait penanganan PMK di Jatim mampu direspon secara baik oleh jajaran kehumaaan Kementan.

Menurut Agus, selama PMK mewabah di

Indonesia tidak ada pengaduan laporan informasi yang masuk dengan kategori negatif. Sebaliknya, semua laporan selalu direspon positif melalui layanan informasi publik yang cukup cepat.

"Di tempat kami (Ombudsman Jatim, red) belum pernah menerima pengaduan terkait dugaan atau mungkin potensi informasi yang buruk. Karena itu, kami anggap semua layanan informasi berjalan dengan baik," ujar mantan wartawan itu dalam koordinasi kehumasan dan PPID Kementan terkait wabah PMK di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya, Jumat (27/5/2022).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku optimistis proses penyembuhan hewan ternak yang terkonfirmasi positif dapat dilakukan dengan baik melalui kolaborasi perawatan dan pengawasan yang intens antara pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat.

"Insyaallah bapak, semua hewan ternak yang ada di Aceh maupun wilayah merah lainnya akan terus kita intervensi melalui obat dan vitamin. Alhamdulillah dari data yang kita miliki hewan yang dalam arti meler, tidak bisa bergerak normal dan sebagainya itu semakin sedikit. Artinya proses penyembuhan terus kita lakukan," ujarnya.

SYL juga menyebutkan upaya-upaya konkret Kementan dalam penanganan wabah PMK meliputi penguatan posko dan gugus tugas penanganan PMK di tingkat nasional/provinsi/kabupaten, pembatasan

lalulintas ternak, koordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi lain serta distribusi obat dan vitamin kepada peternak.

Selanjutnya, Kementan juga akan menyediakan vaksin sesuai rekomendasi Komisi Obat Hewan yang dilakukan melalui impor maupun produk dalam negeri oleh Pusvetma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas Kesehatan Hewan, petugas Inseminator dan Pelayan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penderasan informasi positif, leaflet, video, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penemuan serotipe virus PMK tersebut, pada saat ini Pusvetma Kementan sedang membuat vaksin PMK yang ditargetkan selesai Minggu keempat pada Agustus 2022, selanjutnya akan di ikuti langkah vaksinasi massal seluruh populasi ternak yang berpotensi terkena PMK," ujar Mentan.

Di tempat terpisah, Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementan bersama Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melakukan koordinasi terkait upaya percepatan produksi vaksin PMK, yang sedang dikerjakan oleh Kementan di Pusvetma pada Rabu (25/5/2022).

Khofifah menyebutkan, Pusvetma Kementan merupakan fasilitas di Indonesia yang dapat menyiapkan vaksin PMK. Pembuatan vaksin di Pusvetma Kementan akan melibatkan para ahli yang sebelumnya pernah membuat vaksin PMK pada 1980-an lalu.

"Kunjungan ke Pusvetma ini dilakukan guna melakukan pengendalian PMK di Jawa Timur yang berdampak bagi Provinsi Jawa Timur terutama dampak ekonomi. Ada beberapa pakar yang akan membantu menangani pembuatan Vaksin PMK, di antaranya yaitu Prof Dr Suprpto Ma'at dan Prof Dr drh Fedik Abdul Rantam," ujarnya. **(tim humas)**



# Sektor Pertanian

## SERAP LOKER 2022

Sektor pertanian terus membuka lowongan kerja (loker). Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif, dimana distribusi penduduk yang bekerja mencapai 29,96 persen atau sekitar 1,86 juta orang pertahun (YonY). Dengan demikian, sementara tingkat pengangguran pada 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Pada Februari 2021 angkanya masih 6,26 persen dan sekarang turun menjadi 5,83 persen,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam berita resmi statistik yang digelar melalui video conference, Senin (9/5/2022).

Di sisi lain, Margo mengatakan, Nilai Tukar Petani (NTP) yang dihitung berdasarkan tahunan (YonY) juga mengalami kenaikan, dimana NTP pada April 2022 mencapai 108,46 atau lebih tinggi jika dibandingkan nilai NTP April 2021 yang hanya 102,93.

Selain NTP, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada April 2022 mengalami kenaikan cukup tinggi jika dibandingkan kondisi NTUP April 2021, dimana angkanya hanya 103,55. Sedangkan NTUP tahun ini mencapai 108,64. Meski demikian, baik NTP maupun NTUP yang dihitung secara bulanan mengalami penurunan.

Menurut Margo, penurunan terjadi karena indek harga yang diterima petani nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan indek yang harus dibayarkan petani. “Indek harga yang diterima petani kenaikannya hanya meningkat 0,06 persen sementara indek yang dibayar petani 0,83 persen,” katanya.

Terpisah, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menjelaskan, penurunan NTP dan NTUP di beberapa sektor disebabkan peningkatan harga kebutuhan petani dan rumah tangga seperti minyak goreng dan bahan bakar, serta peningkatan biaya produksi pada beberapa komoditas, namun penerimaan petani tetap baik karena permintaan tinggi untuk komoditas pangan dan pertanian terutama saat puasa dan Lebaran 2022.

### Ajak Saudagar Bugis

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak pengusaha lokal atau saudagar Bugis untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan pertanian nasional. Menurutnya, pertanian adalah sektor strategis yang mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia dari hulu ke hilir.

Sebagai catatan, kata SYL, sektor pertanian mengalami pertumbuhan tinggi, yakni sebesar 16,24 persen pada Triwulan II 2020 (QtoQ). Disisi lain, produksi dalam negeri terus meningkat dan ekspor nasional terus melesat.

“Alhamdulillah selama ini stok pangan kita cukup dan tidak ada impor yang dilakukan selama tiga tahun terakhir. Bagi saya, orang Bugis itu hebat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena itu saya mengajak untuk turut serta dalam membangun sektor pertanian ini,” ujarnya, Minggu (15/5/2022).

### Hari Pertama Kerja

Kementan menggelar apel pagi bersama di lapangan utama Kementan, Jakarta, Senin (9/5/2022). Kegiatan ini merupakan aktivitas hari pertama masuk kerja setelah melewati masa libur nasional selama sepekan terakhir, setelah Idulfitri 2022. Acara dibuat sederhana dengan penuh doa dan kehangatan.

Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan bahwa momen Syawal harus dijadikan cambuk bagi para pegawai untuk saling memaafkan agar kinerja Kementan terus mengalami peningkatan. Hati yang ikhlas serta doa yang kuat bisa dijadikan penguat untuk ketahanan pangan nasional.

“Hari ini (9/5/2022) kita bekerja harus dimulai dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena makna Ramadan itu adalah menjadikan kita sebagai orang yang makin beriman. Saya meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan saya selama bekerja,” ujarnya saat memberikan arahan singkat. **(tim humas)**



# Pujian Jaga Stok Pangan Ramadan dan Lebaran

**K**eberhasilan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memenuhi ketersediaan pasokan 12 bahan pokok selama bulan Ramadan hingga Lebaran atau Idulfitri 2022 mendapat pujian.

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara mengatakan, upaya Kementan untuk tetap mengelola bahan pokok di tengah kondisi nasional yang baru pulih dari Pandemi Covid-19 sebagai pencapaian yang luar biasa dan patut diapresiasi.

“Seperti yang sama-sama kita ketahui, dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita berkontraksi cukup dalam. Namun, Kementan melalui berbagai kebijakan dan program berhasil menjaga ketersediaan atas 12 kebutuhan pokok tersebut. Karena menjaga produktivitas 12 kebutuhan pokok ditengah kondisi perekonomian yang kurang stabil, bukanlah perkara mudah,” ujarnya di Bengkulu, Minggu (1/5/2022).

Surya menilai jika bahan pokok tidak dikontrol dengan baik, maka akan berdampak buruk pada perekonomian dan aspek lainnya bagi masyarakat. Tak hanya itu, dirinya membeberkan dampak buruk yang akan terjadi di antaranya kenaikan harga hingga adanya ancaman gizi buruk.



Mengenai kenaikan harga, lanjut Surya, akibatnya akan muncul kesenjangan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok. Masyarakat yang tidak memiliki daya beli tinggi akan kehilangan akses tersebut.

Terkait gizi buruk, Surya beranggapan jika bahan pokok langka di pasaran maka masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi makanan yang seharusnya bisa dijamin. “Dikarenakan gizi buruk akan memicu penyakit turunan hingga kematian,” tandasnya.

Sebelumnya, jajaran Kementan gencar melakukan monitoring ke pasar-pasar di berbagai provinsi hingga kabupaten untuk meninjau dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat.

Hal tersebut dipimpin langsung Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 2022. “Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa Kementan harus ada bersama masyarakat dalam dinamika apapun,” tegas Mentan SYL saat meninjau pasar beberapa waktu lalu di Jakarta.

Di Jawa Tengah (Jateng), Kementan terus memantau dan mengontrol ketersediaan 12 bahan pangan strategis sebelum dan sesudah hari raya agar tetap aman. Salah satunya dengan melakukan kegiatan panen padi dan gerakan tanam kacang kedelai di Kabupaten Kulon Progo.

“Saya sangat senang sekali dengan Kulon Progo ini, hasil panen padinya tiap tahun sudah surplus, sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, setiap daerah harus selalu berinovasi, melakukan terobosan-terobosan baru” ujar Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi saat melakukan kegiatan panen padi dan gerakan tanam kacang kedelai di Desa Bonoroso, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Kulon Progo, Jumat (6/5/2022).

Di Sukoharjo, Kementan terus bergerak meskipun masih dalam suasana Idulfitri tidak henti-hentinya untuk terus mengontrol ketersediaan 12 pangan

strategis tetap aman dan juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat guna memastikan kegiatan pertanian tetap berjalan agar produksi pertanian terus meningkat. Setelah dari Blitar, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi melakukan kunjungan ke Desa Selat, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Jumat (6/5/22) untuk meninjau lokasi pertanaman kedelai.

Dia mengatakan, pihaknya saat ini tengah menggenjot produksi dalam negeri, langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan stok kedelai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. “Di tahun ini Kementan sudah mempersiapkan lahan untuk meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri,” jelasnya.

Adapun lahan pertanaman kedelai itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Diantaranya, Provinsi Sulawesi Selatan, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi dan Banten

## Pertanaman IP300

Mentan Syahrul Yasin Limpo menggelar Tanam perdana padi sekaligus penanaman perdana indeks pertanaman (IP) 300 atau penanaman 3 kali setahun (padi-Padi-jagung).

“Jeneponto adalah daerah yang dikaruniai Allah luar biasa, dan pertanian itu merupakan jawaban dari hadirnya kehidupan yang lebih baik dan banyak sekali perintah agama kita yang mengatakan bahwa bertanam itu kehidupanmu” ujar Mentan pada acara tanam tanam perdana padi di lokasi IP300 di Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Tulatea, Kabupaten Jeneponto, Minggu (15/5/22).

“Pertanian itu selain untuk kebutuhan pangan kita juga untuk membuka lapangan pekerjaan, pertanian bisa dikerjakan oleh anak kecil, laki-laki, perempuan sampai orang tua oleh karena itu inilah peluang yang sangat terbuka,” ujarnya. **(tim humas)**



# ORDER NAIK,

## Ekspor Pertanian Masih Ciamik

Ekspor sektor pertanian hingga saat ini masih ciamik atau bagus. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor pertanian pada April 2022 mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 15,89 persen (YonY) dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh naiknya order atau permintaan beberapa komoditas ke negara-negara besar seperti China dan Amerika. Dengan kenaikan tersebut, maka sektor pertanian memiliki total share sebesar 1,44 persen.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, kenaikan ekspor pertanian juga terjadi apabila dihitung secara kumulatif, yakni dari Januari sampai April 2022. Kenaikan bahkan mencapai 11,93 persen atau dengan total share mencapai 1,66 persen.

“Dengan begitu sektor pertanian menyumbang total ekspor untuk nonmigas mencapai 94,93 persen. Sedangkan jika dihitung secara bulanan sektor pertanian turun karena komoditas kopi dan buah buahan,” jelasnya, Selasa (17/5/2022).

Perlu diketahui, total nilai ekspor pada April 2022 mencapai USD 27,32 miliar atau naik 3,11 persen (MtoM) jika dibandingkan pada Maret 2022. Sedangkan kalau dibandingkan pada April 2021 naiknya sebesar 47,76 persen (YonY). “Yang pasti ekspor nonmigas kita meningkat 3,17 persen sedangkan migasnya meningkat 2,01 persen,” tandasnya.



Di sisi lain, upah buruh tani secara nominal pada April 2022 tercatat Rp58,109 atau meningkat 0,29 persen. Demikian juga dengan upah buruh bangunan yang tumbuh sebesar 0,01 persen. “Tapi upah riil keduanya turun tipis,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, kenaikan ekspor yang dihitung secara tahunan maupun kumulatif merupakan bukti bahwa pertanian adalah salah satu sektor yang paling strategis yang bisa meningkatkan perekonomian nasional.

“Pertanian terbukti mampu mendorong percepatan ekonomi baik melalui usaha dalam negeri maupun jumlah ekspor. Semua berkaitan dengan program pemerintah yang mengakomodir semua kepentingan pembangunan pertanian. Termasuk program peningkatan produksi dan kesejahteraan petani yang dijalankan Kementan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pelaku usaha milenial binaan Ditjen Perkebunan Kementan mengharumkan nama Indonesia, yaitu PT Ince Jaya Mandiri berhasil

menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan buyer produk rempah untuk pasar Italia dan Eropa sebesar USD 4,2 juta atau senilai Rp61 miliar. Ini terjadi usai digelarnya pameran MACFRUT & Spices and Herbs Global Expo pada 4-6 Mei 2022 di Rimini Expo, Italia.

Pavilion Indonesia, pada pameran yang difasilitasi Kedutaan Besar RI (KBRI) Roma, menampilkan beberapa produk pertanian seperti rempah-rempah, hortikultura dan olahan daging. Pameran ini disambut antusias yang tinggi dari para pengunjung pameran yang sebagian besar berasal dari pelaku usaha dan industri makanan minuman serta industri kuliner bahkan restoran dari Italia dan negara Eropa.

“Terbukti sukses, dari tiga hari pameran ini, diperoleh potensi transaksi sebesar lebih dari USD 4,2 juta dari produk rempah dan hortikultura Indonesia, dengan calon buyer dari berbagai negara, seperti Italia, UAE, Jerman, Uganda, Bulgaria, Albania. Potensi ini meningkat delapan kali dari tahun sebelumnya yang sebesar 550.000 euro,” ujar Ali Jamil, plt dirjen Perkebunan.

Di lain tempat, ekspor pertanian Sulawesi Utara (Sulut) mencapai Rp5,8 triliun pada 2021. Sementara pada 2022, hingga 20 Mei 2022, ekspor pertanian mencapai Rp2,9 triliun. Pada Jumat (20/5/2022), Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Jan S. Maringka melepas ekspor komoditas pertanian senilai Rp83 miliar di Terminal Peti Kemas Bitung di Bitung, Sulut.

Komoditas yang diekspor seperti bunga pala, pala biji, kelapa parut, bungkil kelapa, daging pala, bungkil sawit, dan santan kelapa. Ekspor ditujukan ke 15 negara antara lain India, Vietnam, Italia, Selandia Baru, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Argentina, Belanda, Australia, Chili, Amerika Serikat, dan Korea. **(tim humas)**



# Mengatur Skema Si Bawang Merah

Pengamanan Pasokan 2023

Usai sukses mengamankan pasokan bawang merah pada Idulfitri 2022, Kementerian Pertanian (Kementan) menyusun sejumlah skema pengamanan pasokan pada 2023. Menteri Pertanian (Menta) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menginginkan ketersediaan pangan cukup dan merata untuk semua wilayah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Prihasto Setyanto bersama jajaran mengunjungi tiga gudang penyimpanan bawang berlokasi di Brebes, Jawa Tengah (Jateng). "Ketersediaan bawang merah menghadapi

Iduladha 2022 aman. Kebutuhan 4.000 ton dapat dipenuhi. Justru ini kami sedang merancang pada 2023 di mana perlu dipersiapkan lebih matang," ujarnya, Selasa (4/5/2022).

Prihasto menyiapkan skema jangka pendek dan jangka panjang dalam kurun satu tahun ini. Pertama, mendengar masukan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) untuk membeli sejumlah kecil benih bawang merah dari negara tetangga. Kedua, memberikan bantuan subsidi tanam untuk wilayah penyangga. Ketiga, bantuan distribusi.



"Untuk pertanaman sekarang, teman-teman ABMI mengatakan bahwa harga benih berada di angka Rp38-40 ribu. Buat teman-teman petani ini adalah nilai yang tinggi. Mengantisipasi hal ini, rencananya petani besar bisa membeli benih dari negara tetangga untuk diproses sekarang. Sementara petani kecil diharapkan menanam dari benih yang disimpan," jelasnya.

Hal ini, lanjut Prihasto, dikarenakan pada 2020 petani kecil menjual benihnya ke petani besar hingga harga melonjak dan benih sulit diperoleh. Hal ini cukup dimaklumi karena kondisi sulit pada saat itu. "Tahun depan, untuk wilayah penyangga kami akan beri subsidi tiap satu 1 ha dapat 1 ton bibit berikut bantuan saprodi senilai Rp6 juta. Kalau sudah panen diharapkan menstabilkan harga. Jika bisa jual di bawah harga Rp37-40 ribu," lanjutnya.

Tidak sampai di situ, Prihasto berikut jajaran berencana untuk memberikan subsidi untuk keperluan tiba di Jakarta. "Jadi khusus untuk keperluan Lebaran tahun

depan kami akan membuat subsidi sewa gudang dan distribusi (ongkos kirim, red). Apalagi info dari petani, bawang merah pada April itu adalah masanya harga tinggi. Dengan demikian kalau bisa panen pada Januari minimal 4.000 ton. Nah ini sudah disanggupi oleh ABMI siap di gudang dalam bentuk askip," terangnya.

Mengenai ketersediaan pasokan pada Iduladha ke depan, Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Yulia Hendrawati turut mengamini. "Untuk Iduladha ini dari pertanaman Mei, ada luasan 3.402 ha yang akan dipanen pada Juli nanti. Total produksi nantinya 15.208 ton. Ini dari Brebes saja. Jika kebutuhan pada Iduladha sebesar 400 ha atau 4.000 ton, ini artinya sudah aman jika hanya mengandalkan dari Brebes," jelasnya.

### Apresiasi Jagung

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi



mengapresiasi program dan kerja nyata Kementan dalam meningkatkan produksi jagung nasional hingga pertengahan 2022 ini. Hal ini dikatakannya dengan merujuk data BPS, produksi bersih jagung sampai Juni 2022 dengan kadar air 14 persen sebesar 9,7 juta ton, sehingga ketersediaan jagung dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan secara nasional.

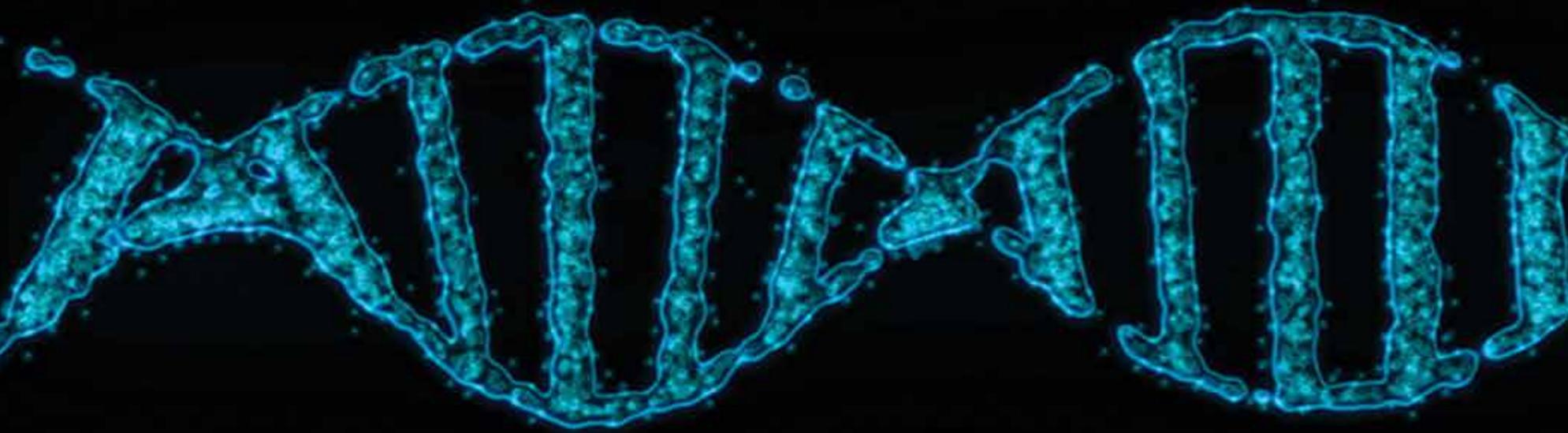
"Data BPS pun mencatat sejak 2019 hingga sekarang belum ada impor jagung pakan ternak. Artinya apa? Ini membuktikan pasokan jagung yang diproduksi petani kita mampu memenuhi permintaan atau kebutuhan dalam negeri," ujarnya di Bogor, Minggu (22/5/2022).

Sekretaris ICMI Orwilsis Bogor ini pun menegaskan capaian keberhasilannya upaya pemerintah meningkatkan produksi jagung juga dibuktikan dengan data prognosa Kementan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Yakni luas panen jagung nasional periodeo Januari-Mei 2022 seluas 2,44 juta hektare dengan produksi bersih sebesar 9,26 ton --kadar air 14 persen.

"Ini benar-benar menunjukkan ketersediaan stok jagung sampai saat ini sangat cukup dan bisa dikendalikan. Saya berharap pemerintah, khususnya Kementan terus melakukan peningkatan produksi dengan berbagai kolaborasi dan inovasi, khususnya dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha," tegasnya. **(tim humas)**

# Demi Kualitas, Uji **DNA** Penting

## Tepis Benih Palsu Tanaman Perkebunan



**B**enih tanaman merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan produksi tanaman pekebun. Demi menjaga kualitas benih tanaman serta meningkatkan produktivitas, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Perkebunan menerapkan teknologi uji DNA pada benih tanaman perkebunan.

"Untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit penerapan teknologi DNA menjadi hal yang sangat penting dan harus diawali dari penyediaan benih kelapa sawit yang bermutu," ujar M. Saleh Mokhtar, Direktur Perbenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan mewakili Sekretaris Ditjen Perkebunan dalam sambutannya pada Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 'Urgensi Uji DNA terhadap Benih Tanaman Perkebunan' di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (23/5/2022).

Dia menjelaskan, selama ini proses pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan melibatkan fungsi UPT Sertifikasi dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Namun dengan adanya penemuan teknologi uji DNA yang bisa mendeteksi keberadaan tanaman non Tenera (dura dan psifera) sejak dari fase embrio hingga bibit, maka inovasi ini perlu dimanfaatkan dalam penguatan fungsi pengawasan benih kelapa sawit.

"Penerapan uji DNA benih tanaman kelapa sawit menjadi dasar melakukan pembinaan dan perbaikan mutu, dan jangka panjang nantinya akan menjadi metoda pengujian kemurniaan benih. Tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki justifikasi teknis dan yuridis dalam penerapannya," ujar Saleh.

Dia menambahkan, FGD ini dimaksudkan untuk

mengumpulkan data dan informasi mengenai uji DNA Benih Tanaman Perkebunan, dan menyamakan pemahaman, serta pemilihan metode penganggaran yang tepat sesuai peraturan yang berlaku. Nantinya akan digunakan sebagai bahan saat menyusun kebijakan atau peraturan. "Yang paling perlu diperhatikan, bagaimana nanti legalitasnya. Hasil diskusi ini akan dirumuskan untuk menjadi bahan saat membuat suatu kebijakan, karena dalam penyusunan kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga perlu dikaji dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Saleh juga menjelaskan, untuk memastikan benih pada tanaman perkebunan yang akan diedarkan merupakan benih unggul dan memenuhi syarat dan prosedur sekaligus menepis dugaan adanya peredaran benih palsu dan isu mafia benih, maka perlu dilakukan penerapan uji DNA pada benih tanaman. "Uji DNA terhadap Benih Tanaman Perkebunan sangat perlu dilakukan karena merupakan salah satu metode penting sebagai identifikasi benih untuk mengetahui asal-usul dan otentifikasi benih dalam sistem perbenihan tanaman perkebunan," ungkapnya.

Menurut Saleh, ketika uji DNA ini dilaksanakan, harus ditentukan ditahap atau jenjang apakah uji DNA ini akan diterapkan. "Apakah di produsen benih ketika benih belum beredar atau dilakukan pada saat sebelum dilakukan penanaman benih di kebun mengingat rentang proses

bisnis mulai dari produsen sampai pada penanaman merupakan proses yang cukup panjang," ujarnya.

Saleh menambahkan, dari sisi penyusunan kerangka regulasi perlu diperhatikan aspek kebermanfaatannya berupa harga yang tidak menjadi lebih mahal ataupun kegiatan uji DNA ini yang akan menimbulkan monopoli bagi pihak tertentu. Selain itu, Kelembagaan, pembiayaan dan mekanisme Uji DNA perlu disusun dengan baik agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

"Kebijakan uji DNA benih dan pengawasan peredaran benih perlu dipayungi dengan regulasi yang sesuai peraturan perundang-undangan, serta didukung kerjasama dan perhatian semua pihak terkait untuk mendukung benih bermutu bersertifikat dan memberantas benih illegitim," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama PPKS menyampaikan, Dengan adanya pengujian DNA ini, hasilnya akan terlihat pada peningkatan kualitas hasil industri CPO. Namun seiring berjalan seharusnya ada proporsi yang adil baik di hulu (petani) maupun hilir (industri). Apabila dilakukan secara mandatori harus tepat sasaran, dan berasas manfaat bagi semua.

Sementara itu, Pipit Puspita peserta dari Bapenas menjelaskan, belum ada batasan khusus seberapa besar yang bisa dibiayai, diharapkan pemanfaatan digunakan untuk projects yang strategis berdampak besar dan signifikan dirasakan oleh masyarakat. **(tim humas)**



# Mengawal Pertanian via Sinergitas Aparat

Jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) diminta untuk bekerja memperkuat pengawalan pembangunan pertanian nasional melalui sinergitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti BPK, Polri dan Kejaksaan.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Jan Samuel Maringka meminta sektor pertanian kian strategis karena terbukti mampu menjadi penyanggah ekonomi nasional. Pertanian tumbuh positif di tengah lesunya ekonomi nasional akibat pandemi.

“Pertanian di bawah Pak Menteri (SYL) tumbuh positif di tengah pandemi. Ekspor kita naik, PDB kita naik dan NTP juga naik. Ini artinya pertanian sangat strategis dan mampu menjadi bantalan ekonomi nasional,” katanya.

Jan menambahkan, penguatan tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui fungsi pengawasan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. “Saya selalu mengatakan bahwa jaga pangan itu harus berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas. Di antaranya membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional,” ujar Jan dalam rapat kerja teknis pengawasan Itjen Kementan pada 2022 di JSI Bogor, Senin (30/5/2022).

Dia mengatakan, Itjen Kementan dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL) harus mampu merealisasikan pembangunan pertanian maju, mandiri dan modern. Salah satunya dengan refocusing pengawasan di lingkungan Kementan. “Refocusing itu bukan hanya anggaran saja, tetapi kinerja kita harus lebih cepat, tepat dan mampu merealisasikan pembangunan pertanian maju, mandiri dan modern,” tandasnya.

Jan meminta jajaran Itjen harus mampu membangun

sistem pelaporan yang terintegrasi yang lebih cepat dan akurat, serta membangun kemitraan strategis dengan seluruh stakeholder pertanian. “Perubahan iklim juga menjadi tantangan sektor pertanian kedepan. Untuk itu perlu strategi, termasuk dalam pengawasan program dan kegiatan. Kita harus terus melakukan audit, pengawasan SPIP, evaluasi, revidu, dan pengawasan intern lainnya. Jaga pangan, jaga masa depan kita,” ujarnya. **(tim humas)**



# Atasi Wabah PMK, Puskesmas Daerah Aktif Kunjungi Peternak

Puskesmas di berbagai daerah aktif bergerak mengunjungi para peternak untuk mengatasi wabah PMK.

- Dalam kasus penyakit mulut dan kuku, Pusat Kesehatan Hewan menjadi garda terdepan untuk memberikan pelayanan tepat bagi para peternak.
- Sabtu, 28 Mei 2022 Puskesmas di Sukabumi dan Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa upaya seperti memberikan vitamin A, D dan E pada ternak yang beresiko tertular.
- Tidak hanya itu, Puskesmas di kedua daerah pun melakukan pemeriksaan tanda klinis pada ternak kambing milik peternak dan melaksanakan pelayanan kesehatan.



Semoga dengan berbagai upaya pemerintah, kasus PMK dapat segera terselesaikan ya sob.



*Congratulations!*

**KEMENTERIAN  
PERTANIAN RI**

Raih Piagam Penghargaan  
**Predikat Kepatuhan Tinggi Standar  
Pelayanan Publik 2021**